

Penguatan Nilai-Nilai.... (Muhammad Ridwan)

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

Judul : Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nama : Muhammad Ridwan  
NIM : 11401244040  
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Reviewer

Dr. Sunarso, M.Si.  
NIP. 19600521 198702 1 004

Yogyakarta, 30 Juli 2018  
Pembimbing

Drs. Cholisin, M.Si.  
NIP. 19550801 198503 1 002

Rekomendasi Pembimbing: (mohon di lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

**PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN  
PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**STRENGTHENING OF PANCASILA VALUES IN TOURISM IMPLEMENTATION  
BY TOURISM DEPARTMENT IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

**Muhammad Ridwan**

[Barkhoiridwan@yahoo.co.id](mailto:Barkhoiridwan@yahoo.co.id)

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, FIS, UNY

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan mendeskripsikan: (1) Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata di DIY: (2) Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata di DIY: (3) Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata di DIY.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018. Penentuan subjek menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian yaitu Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pariwisata DIY Ibu Dra. Titi Sulistyani, Ketua Harian Desa Wisata Bapak Sumijan, dan Pegunjung Wisata Sdr. Farchan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan Observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dinas Pariwisata telah mendeskripsikan penguatan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan YME, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia namun nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya terimplementasi (2) Kendala-kendala dalam penguatan nilai-nilai Pancasila yang baik terdiri dari : (a) Minimnya rasa toleransi didalam masyarakat (b) Kelembagaan yang belum maksimal dan sumber daya manusia yang kurang profesional (c) Masih sering terjadinya konflik antara masyarakat sadar wisata dan bukan sadar wisata, (d) Adanya oknum wisata yang tidak bertanggung jawab dan menguntungkan pribadi; (3) Upaya untuk meminimalisasi kendala-kendala dalam penguatan nilai-nilai Pancasila terhadap penyelenggaraan Pariwisata di DIY: (a) Peningkatan kapasitas SDM yang profesional dan bersertifikat, (b) Peningkatan sinergitas antar lembaga pariwisata, (c) Menciptakan kepariwisataan lintas sektor, (d) Optimalisasi peran serta asosiasi kelembagaan, (e) Peningkatan kualitas kelompok sadar wisata yang berkelanjutan, (f) Peningkatan kualitas dan kuantitas sapta pesona, (g) Pengembangan pemasaran pariwisata dalam peningkatan integrasi antar semua stagholder, (h) Meningkatkan variasi dan perluasan promosi informasi Pariwisata secara efektif dan efisien.

**Kata Kunci : Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

**ABSTRACT**

This research aims to find out: (1) Strengthening Pancasila values in tourism implementation by Tourism Department in Special Region of Yogyakarta; (2) Problems that are faced by the Tourism Department in strengthening Pancasila values in tourism implementation in the Special region of Yogyakarta; (3) The efforts that are made by the Tourism Department in Strengthening the values of Pancasila in tourism implementation by Tourism Department in Special Region of Yogyakarta.

The research is a descriptive research with qualitative approach. This research was done on February 2018 to May 2018. The determination of the subject is using purposive techniques. The research subject is Head of Institutional Section of Tourism Department in Special Region of Yogyakarta Mrs. Dra. Titi Sulistyani, chairman of the tourist village daily Mr. Sumijan and tourist visitor of the Mr. Farchan. Data collection is done by interview technique and observation. Data validation testing is using cross check technique. The technique of analysis data is using inductive techniques, which consists of data reduction, data display and conclusion.

The results of the research shows that: (1) Tourism Department has implemented well the values of Pancasila, such as belief in the one and only God, a just and civilized humanity, a unified Indonesia, democracy led by the wisdom of the representatives of the people, and social justice for all Indonesians. But a just and civilized humanity and social justice for all Indonesians have not been fully described properly; (2) The problems in strengthening of Pancasila values consist of: (a) There are people in Special Region of Yogyakarta who still lack of respect in tolerance (b) The institutional is lack of professional and maximum in human resources (c) Conflict between people who concern about tourism and people who do not concern about it (d) There are people who still do not have a responsibility and make personal profit; (3) Efforts to minimize problems in strengthening Pancasila values in tourism implementation and management in Special Region of Yogyakarta: (a) The enhancement of professional and certified human resources capacity, (b) Increasing a synergy between tourism institutions, (c) Creating an across sector tourism (d) Optimizing the participation of institutional association (e) Increasing the quality of sustainable tourism awareness people, (f) Increasing the quality and quantity of *sapta pesona*, (g) Developing tourism marketing in increasing integration among all stakeholders, (h) Improving the variation and expansion of tourism information promotion effectively and efficiently.

**Keywords: Strengthening Pancasila Values in Tourism Implementation by Tourism Department in Special Region of Yogyakarta.**

## A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna yang luas bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Untuk itu Pancasila sebagai dasar negara dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggaraan negara yang terencana, sistematis, dan terpadu agar warisan jenius Nusantara tetap terjaga dengan baik dari arus global sebagai pemersatu perbedaan rakyat Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut pula, pada tanggal 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila adalah unit kerja yang melakukan pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan

ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dimana hal tersebut terkandung dalam sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai tujuan dari pada empat sila yang mendahuluinya, yang menjadi tujuan bangsa kita serta proklamasi kemerdekaan. Keadilan sosial menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan tidak hanya bagi rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Hal ini ternyata dari yang ditentukan dalam kalimat ke-empat pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa pembentukan "suatu Pemerintahan Negara Indonesia adalah juga untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sedangkan untuk tujuan bagi negara Indonesia sendiri adalah melakukan pembangunan nasional disegala aspek yang berlandaskan Pancasila bagi

kehidupan ekonomi dan salah satunya ialah bertujuan dalam pembangunan pariwisata diseluruh daerah dalam upaya menyadarkan kampanye nasional. Dalam Undang-undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mengamanatkan tujuan pariwisata berdasarkan Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Sangat disadari oleh pembuat kebijakan bahwa pariwisata adalah "*clean and safe indutry*". Untuk itu menghadirkan bisnis rekayasa pariwisata di Indonesia menuntut adanya berbagai jaminan agar lingkungan (baik sosial, politik, ekonomi dan budaya) senantiasa berada dalam kondisi bersih dan terjamin keamanannya. Mengenai pariwisata secara garis besar telah diungkapkan oleh Wahab (2003:11) bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan hasil, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Spillane (1999, dikutip dari selo soemardjan,1999:133) pemerintah daerah ini mempunyai peranan penting dalam pembangunan pariwisata bahwa pengembang pariwisata harus merupakan pengembang yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh segi ekonomi, sosial, kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, sosial dari suatu Negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan

pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa kekawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek seperti aspek budaya, sejarah, dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan (Mill, 2000: 168).

Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan bidang disamping itutersebut. Bercicara tentang pariwisata didalamnya tercakup berbagai upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah potensi pariwisata terbesar kedua di Indonesia menjadikan sebuah harapan bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat serta terwujudnya sumbangsi perkembangan pembangunan nasional secara menyeluruh. Hal tersebut telah di atur penyelenggaraanya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Hal tersebut disebabkan keadaan historis Daerah Istimewa Yogyakarta sejak beberapa abad lalu merupakan pusat pemerintahan dan pengembangan kebudayaan yang dimulai sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Mataram Islam hingga Kerajaan Yogyakarta Hadiningrat saat ini. Yogyakarta yang dianggap sebagai pertemuan antara tradisional dan kemandernan serta bertemunya berbagai peradaban seperti Agama Hindu, Budha dan Agama Islam menjadi beberapa keunggulan kompetitif industri pariwisata di Yogyakarta yang perlu pengelolaan lebih lanjut.

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara kebijakan dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam penyelenggaraan perkembangan sektor pariwisata harus berpedoman terhadap budaya yang telah menjadi identitas asli masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta serta tanpa merusak nilai-nilai kebangsaan yaitu pancasila sebagai pedoman dalam membentuk identitas bagi kehidupan

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah tidak salah kalau pengembangan kebudayaan daerah secara khusus dalam hal ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang masih memegang potensi kekuatan budaya harus selaras dengan pengembangan kebudayaan daerah agar nilai-nilai luhur terpatris dalam Pancasila juga maupun diimplementasikan dalam dunia pariwisata secara menyeluruh, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Koentjaraningrat (1979: 204) yang dimaksud nilai budaya adalah merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pemikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat. Sehubungan nilai budaya daerah dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tujuan unsur yang terdapat dalam sapta pesona yang merupakan suatu nilai yang berhubungan dengan kepariwisata berdasarkan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang di binakan melalui aplikasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sapta pesona sendiri merupakan slogan dan program dalam rangka mempromosikan kepariwisata di wilayah Indonesia termasuk Yogyakarta. Dengan Sapta Pesona diharapkan menciptakan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman sehingga wisatawan akan betah tinggal yang pada akhirnya akan menambah pendapat daerah dan devisa negara.

Sebagai tujuan wisata, tentunya penataan infrastruktur harus dibuat sedemikian rupa untuk mendukung sektor pariwisata dan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Soal kemacetan lalu lintas sudah mulai diselesaikan dengan ‘memaksa’ masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum saat masuk kawasan pusat kota. ‘Pemaksaan’ ini dibuat dengan tidak menyediakan lahan parkir dipusat kota, malinkan di pinggiran kota, namun kualitas pelayanan angkutan umum harus dibuat lebih bagus, selain itu daya tarik untuk wisatawan tersedianya jalur pejalan kaki (pedestrian) yang nyaman. Pedestrian kota juga harus terintegrasi / terhubung dengan stasiun kereta api atau terminal, sehingga wisatawan dari luar kota bisa dengan mudah menuju pusat

kota dengan berjalan kaki atau beralih moda dengan angkutan umum lainnya.

Pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kulon Progo dan pembangunan sarana prasarana pendukung, pengembang ruang-ruang pariwisata baru berkelas dunia (*day&night attraction*) disekitar bandara:

1. *Beach front corridor* dari Kulon Progo- Bantul (Konektifitas, Daya tarik, Akomodasi).
2. *MICE Center Destination- Art & Permormace Center* (mendukung aetropolis).
3. *Theme Park* Sermo-Suroloyo.

Dan *Non Stop Shuttle* Bandara-Kota Jogja (Sebagai Pusat Pariwisata). Pengembangan dan Peningkatan aksesibilitas melalui Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) agar membuka konektivitas pantai selatan jawa dan membuka aksesibilitas destinasi wisata di sepanjang pantai DIY. Aspek SDM pariwisata butuh ditingkatkan kapasitas dan Profesionalisme, terutama dalam menghadapi MEA. Pengelolaan produk wisata juga perlu sentuhan yang profesional. Akomodasi / hotel penginapan, rumah makan / restoran, cenderamata, *marketing* / media komunikasi dan kebutuhan lainnya untuk meningkatkan kekuatan meraih peluang serta menjadikan kelemahan dan tantangan sebagai kekuatan butuh pengelolaan secara berkesinambungan.

Berdasarkan Pra Survei yang dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 10.30 Wib Ibu Titi Sulistyani (sebagai kepala seksi pengembangan kapasitas) menjelaskan “Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai identitas budaya terbesar di Indonesia selain Bali menjadikan keunggulan budaya sebagai keterbukaan bagi siapa saja yang mau belajar, dimana DIY merupakan ruang belajar tentang nilai “kerakyatan”. Dari keunggulan tersebut tentu juga terus memperbaiki pengembangan pariwisata dalam menanggulangi permasalahan yang berupa konflik-konflik permasalahan ditingkat bawah, dimana masalah tersebut timbul diakibatkan masih minimnya SDM yang berada pada pembinaan masyarakat. Sehingga konflik antara masyarakat yang belum sadar wisata dan masyarakat kelompok sadar wisata yang sudah sadar wisata (POKDARWIS) tak terhindarkan, selain itu kelembagaan yang belum memadai dalam struktur organisasi masyarakat kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Kendala lain yang menjadikan

penyelenggaraan pariwisata oleh Dinas Pariwisata DIY belum berjalan sesuai apa yg diharapkan ialah karena kurangnya kekuatan dan potensi kesadaran masyarakat DIY dalam penguatan nilai-nilai Pancasila sehingga kedepan diharapkan masyarakat DIY dan kelembagaan Dinas Pariwisata dan seluruh elemen penyelenggara pariwisata mempunyai kesadaran terhadap potensi yang dimiliki dan dapat mendeskripsikan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Pariwisata.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana berdasarkan pendapat Sugiyono (2005: 11) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan melihat *History* dan perkembangan Kepariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata DIY, Desa Wisata kaki langit Dlinggo dan Malioboro pada bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2018. Peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata yaitu Ibu Titi Sulistyani, Kepala harian Desa Wisata Kaki Lagit Bapak Sumijan, dan Pengunjung wisata di DIY Sdr. Farchan.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, dan observasi. Untuk wawancara, ditujukan kepada Dinas Pariwisata DIY Bidang Pengembangan Kapasitas Ibu Titi Sulistyani, Bapak Sumijan selaku Ketua harian Desa Wisata Kaki Langit, Sdr Farchan.

Menurut Nurul Zuriyah (2007: 179), teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Observasi yang peneliti lakukan di Dinas Pariwisata DIY dilakukan dalam tiga tahap. Yang pertama yaitu pra survei guna mengamati kelembagaan Dinas Pariwisata. Pra observasi ini

dilakukan sebelum seminar proposal. Yang kedua yaitu observasi yang dilakukan langsung saat penelitian. Observasi penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal. Menurut Sugiyono (2009:144) penelitian obsevasi ialah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Setelah data diperoleh di Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data tersebut. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *Cross check*, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi tersebut valid atau tidak. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan beberapa hasil mengenai Mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pariwisata oleh Dinas Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil wawancara, observasi peneliti lakukan yang kemudian peneliti olah.

Hasil bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mendeskripsikan Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pariwisata di DIY yang dimana penyelenggaraan pariwisata melibatkan masyarakat untuk terlibat, berpartisipasi dan proaktif dalam penyelenggaraan pariwisata. Kemudian Dinas Pariwisata mengembangkan seluruh potensi lokal melalui kelompok masyarakat (POKDARWIS) dalam pengembangan kepariwisataan di tingkat bawah. Selain itu masyarakat diberikan wewenang dalam mengadministrasi sumber potensi wilayah pariwisata lokal, sehingga menjadikan masyarakat yang mandiri dan maju. Dalam hal ini juga Dinas Pariwisata tidak lepas memberikan sosialisasi dan bimbingan secara berkelanjutan.

Selain itu Dinas Pariwisata juga harus menciptakan dan memberikan keterbukaan dalam dengan memberikan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi, mengemukakan pendapat, mendorong kebersamaan dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras. Dinas Pariwisata menaruh kepercayaan kepada masyarakat secara penuh dan juga selalu proaktif terhadap pengembangan Kepariwisata.

Peran Dinas Pariwisata dalam penyelenggaraan pariwisata adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait perkembangan penyelenggaraan pariwisata dengan cara mengimplementasi penguatan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dalam aspek nilai, Dinas Pariwisata melakukan implementasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadi dorongan kepariwisataan DIY dalam menjaga dan memelihara nilai budaya yang tumbuh di tengah masyarakat sejak lama. Dalam implementasi penguatan kelima nilai Pancasila sebagai berikut: *nilai ketuhanan*, Dinas Pariwisata harus berlandaskan ketuhanan diatas segalanya dengan tidak bersifat mendiskriminatif, Implementasi *nilai kemanusiaan* yang dilakukan melalui penyelenggaraan yang adil bagi seluruh kemaslahatan bersama, *nilai persatuan* menjaga ketoleransian dalam kehidupan bermasyarakat, *nilai permusyawaratan* di implementasikan setiap pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh lapisan elemen pariwisata secara terbuka. *nilai keadilan sosial* penyelenggaraan yang berlandaskan untuk kesejahteraan umum dengan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Hasil penelitian yang sudah peneliti olah dari wawancara tersebut tidak banyak memiliki perbedaan pendapat dalam mendeskripsikan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pariwisata baik oleh Dinas Pariwisata DIY, Bapak Sumijan dan Sdr. Farchan. Validasi data menggunakan *Cross check* sudah sesuai antar masing-masing teknik.

Dalam hal ini juga terdapat hambatan-hambatan yang dimiliki dalam Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata DIY. *Pertama*, Budaya, kultur, adat istiadat yang berbeda yang ada didalam masyarakat dari daerah asalnya masing-masing selain bisa menjadi keuntungan bagi kepariwisataan, tapi juga bisa menjadi faktor penghambat. Hal tersebut memang tidak bisa dihindarkan meskipun memang alasan atau faktor utama penguatan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah karena perbedaan ini. hal tersebut kadang tetap menjadi hambatan sehingga menjadi konflik didalam masyarakat karena tidak semua masyarakat menerima perbedaan sebagai sebuah anugerah yang harus

dijaga hal ini dikarenakan rasa toleransi keberagaman yang mulai luntur. *Kedua*, masih adanya oknum kepariwisataan yang tidak bertanggung jawab dan ingin menguntungkan pribadi. kendala tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan dan perkonomian dimasyarakat sangat minim atau masih rendah.

*Ketiga*, masih kurang profesionalitas dalam sumber daya manusia (SDM) yang ada di kelembagaan. Sehingga masih menjadi kendala Dinas Pariwisata dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, dimana kelembagaan terkadang masih terkesan acuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara kepariwisataan di DIY hal ini yang menyebabkan masih belum maksimalnya penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pariwisata DIY.

Adapun cara mengatasi upaya hambatan-hambatan tersebut Dinas Pariwisata dalam hal ini memiliki strategi cara penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pariwisata. *Pertama* memberikan edukatif, maupun ekspresif terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kepariwisataan yang berpusat pada kemampuan masing potensi yang berada di masyarakat lokal untuk mengekspresikan dirinya secara penuh sehingga menjadi manusia yang berkarakter dan dapat mandiri meningkatkan taraf hidup sosial.

*Kedua* mensinergiskan semua lembaga kepariwisataan. Dimana strategi tersebut meliputi keterbukaan dalam hal administratif kelembagaan dalam Proses penyelenggaraan dan juga harus dapat dipertanggung jawabkan serta transparan.

*Ketiga* dalam seluruh Penyelenggaraan pariwisata Dinas Pariwisata dan elemen masyarakat yang tergabung dalam kepariwisataan harus terus bersinergis dan masyarakat juga harus berpartisipasi untuk meminimalisir terjadinya konflik horizontal maupun vertikal. Selain itu Dinas Pariwisata dalam kewajibannya mengembangkan pariwisata DIY yang maju sesuai dengan visi misinya tidak bosan-bosan memberikan pengarah, bimbingan, kontrol terhadap penyelenggaraan pariwisata di tingkat bawah dalam hal ini desa/kampung wisata agar meningkatkan potensi kemampuan dan menciptakan karakter masyarakat yang berlandaskan budaya dan nilai-nilai Pancasila.

#### D. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata sebagai penyelenggara Pariwisata dalam

melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dimana dalam penyelenggaraan pengembangan sektor pariwisata Daerah harus berpedoman terhadap nilai budaya yang telah menjadi identitas asli masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta serta tanpa merusak nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam membentuk identitas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini implementasi dari nilai-nilai tersebut *nilai ketuhanan*, dimana penyelenggaraan harus berlandaskan ketuhanan diatas segalanya dengan tidak bersifat mendiskriminatif kepada siapapun, Implementasi *nilai kemanusiaan* yang dilakukan melalui penyelenggaraan yang adil bagi seluruh kemaslahatan bersama, *nilai persatuan* menjaga ketoleransian baik keberagaman, ras suku dalam kehidupan masyarakat, *nilai permusyawaratan* di implementasikan dimana setiap pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh lapisan elemen pariwisata secara terbuka. *nilai keadilan sosial* penyelenggaraan yang berlandaskan untuk kesejahteraan umum dengan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Adapun Hambatan-hambatan yang dimiliki dalam Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata DIY. *Pertama*, Budaya, kultur, adat istiadat yang berbeda yang ada didalam masyarakat dari daerah asalnya masing-masing selain bisa menjadi keuntungan bagi kepariwisataan, tapi juga bisa menjadi faktor penghambat. Hal tersebut memang tidak bisa dihindarkan meskipun memang alasan atau faktor utama penguatan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah karena perbedaan ini. hal tersebut kadang tetap menjadi hambatan sehingga menjadi konflik didalam masyarakat karena tidak semua masyarakat menerima perbedaan sebagai sebuah anugerah yang harus dijaga hal ini dikarenakan rasa toleransi keberagaman yang mulai luntur.

*Kedua*, masih adanya oknum kepariwisataan yang tidak bertanggung jawab dan ingin menguntungkan pribadi. kendala tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan dan perekonomian dimasyarakat sangat minim atau masih rendah.

*Ketiga*, masih kurang profesionalitas dalam sumber daya manusia (SDM) yang ada di kelembagaan. Sehingga masih menjadi kendala Dinas Pariwisata dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, dimana kelembagaan terkadang masih

terkesan acuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara kepariwisataan di DIY hal ini yang menyebabkan masih belum maksimalnya penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pariwisata DIY.

Adapun cara mengatasi upaya hambatan-hambatan tersebut Dinas Pariwisata dalam hal ini memiliki strategi cara penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pariwisata. *Pertama* memberikan edukatif, maupun ekspresif terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kepariwisataan yang berpusat pada kemampuan masing potensi yang berada di masyarakat lokal untuk mengekspresikan dirinya secara penuh sehingga menjadi manusia yang berkarakter dan dapat mandiri meningkatkan taraf hidup sosial.

*Kedua* mensinergiskan semua lembaga kepariwisataan. Dimana strategi tersebut meliputi keterbukaan dalam hal administratif kelembagaan dalam Proses penyelenggaraan dan juga harus dapat dipertanggung jawabkan serta transparan.

*Ketiga* dalam seluruh Penyelenggaraan pariwisata Dinas Pariwisata dan elemen masyarakat yang tergabung dalam kepariwisataan harus terus bersinergis dan masyarakat juga harus berpartisipasi untuk meminimalisir terjadinya konflik horizontal maupun vertikal. Selain itu Dinas Pariwisata dalam kewajibannya mengembangkan pariwisata DIY yang maju sesuai dengan visi misinya tidak bosan-bosan memberikan pengarah, bimbingan, kontrol terhadap penyelenggaraan Pariwisata di tingkat bawah dalam hal ini Desa/Kampung wisata agar meningkatkan potensi kemampuan dan menciptakan karakter masyarakat yang berlandaskan budaya dan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan bagi Dinas Pariwisata khususnya yaitu *pertama*, seluruh kelembagaan Pariwisata harus memiliki profesionalitas yang tinggi dan bersertifikat.

*Kedua*, untuk kelompok masyarakat Desa/Kampung sadar Wisata (POKDARWIS) yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pariwisata diharapkan untuk terus meningkatkan peranan dan partisipasi agar pemahaman dan penerapan nilai-nilainya lebih baik lagi.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Koentjaningrat. (1979). *Peranan Kebudayaan Daerah dalam Perwujudan Masyarakat Industri Pariwisata di Daerah Istimewa*

- Yogyakarta. Departemen Pendidikan Dan Budaya.
- Mill, Robert Christie. (2000). *Tourism the International Bussines*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nurul Zuriah. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi)*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Review Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. 2017. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Salah Wahab. (2003). *Pemasaran Pariwisata*. PT. Pradinya Paramita. Jakarta.
- Spillne, James. (1999) *Ekonomi Pariwisata: Sejarah Prospeknya*. Dalam Selo Soemardjan Yogyakarta, Kanisus.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata